

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan hak memperoleh pekerjaan bagi penyandang disabilitas di Kota Jambi dan Untuk mengetahui dan menganalisis kendala yang dialami perusahaan dalam melaksanakan pemenuhan kuota hak kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas serta bagaimana solusi atau upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kota Jambi. Metode penelitian yang digunakan dalam Skripsi ini adalah penelitian Yuridis Empiris. Hasil dari Penelitian yang dilakukan, penulis menemukan bahwa pemenuhan hak memperoleh pekerjaan bagi penyandang disabilitas menunjukkan bahwa masih kurangnya dan belum berjalan sebagaimana harapan dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 pada Pasal 53 ayat (2), Dalam pelaksanaan atas pemenuhan hak pekerja bagi penyandang disabilitas masih banyak mengalami kendala sehingga penerapan Undang-Undang tersebut belum berjalan sebagaimana mestinya, dan upaya yang dilakukan oleh pemerintah adalah dengan lebih mensosialisasikan peraturan tersebut dan lebih mempertegas sanksi.

Kata kunci : Hak atas pekerjaan, Penyandang Disabilitas, Pemenuhan hak.

ABSTRACT

The purpose of this research is to find out and analyze the implementation of the right to work for people with disabilities in Jambi City and to find out and analyze the obstacles experienced by companies in fulfilling quotas for the right to work opportunities for people with disabilities and what solutions or efforts are being made by the Jambi City government. The research method used in this thesis is an empirical juridical research. The results of the research conducted, the authors found that the fulfillment of the right to obtain work for persons with disabilities shows that it is still lacking and has not run as expected of Law Number 8 of 2016 in Article 53 paragraph (2), In implementing the fulfillment of workers' rights for persons with disabilities there are still many obstacles with disabilities so that the implementation of the law has not worked as it should, and the efforts made by the government are to socialize the regulations more and to make sanctions more stringent.

Keywords: Persons with Disabilities, Fulfillment of rights, Right to work